

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). *Pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13(2).
- Farhan Shidqi, & Arfiansyah, Z. (2025). *Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 29(1), 1–11.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). Peran audit pemerintah dalam mengendalikan tingkat korupsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 25(1), 54–64.
- Kusmiati, & Purwasih, D. (2024). Pengaruh Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Temuan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan (Studi Empiris BPK Perwakilan Provinsi Jambi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019–2023). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2(3), 749–754
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 27(1), 55–65.
- Pramesti, D. A., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas). Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), 21(4), 1–17.
- Rizki, M., Masnila, N., & Nurhasanah. (2023). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 145–156

- Saraswati, E., & Triyanto, D. N. (2020). Temuan audit dan tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(2), 101–112.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). *Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), Artikel 1.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi III, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi II, Alfabeta, Bandung.
- Suhardjanto, D., Andini, M., & Rahmawati, E. (2018). Determinants of local government corruption in Indonesia: Evidence from audit findings. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 463–477.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32..
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.